

**JPA**  
JURNAL  
PENELITIAN AGAMA

ISSN 1411 - 5875



VOLUME 14, NOMOR 1, JANUARI - JUNI 2013



## Model Penyelesaian Konflik Keagamaan

Asyhabuddir

PUSAT PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO





# JURNAL PENELITIAN AGAMA

Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2011 ISSN 1411 - 5875

JPA adalah jurnal yang secara spesifik menjadi media komunikasi hasil-hasil penelitian keagamaan. Redaksi menerima tulisan yang merupakan hasil penelitian keagamaan. Panjang tulisan 15-40 halaman, terdiri atas *print-out* disertai dengan disketnya. Tulisan diketik dengan spasi ganda dalam program *MS-Word*, dan dikirim ke redaksi di bawah ini. Naskah juga bisa dikirim via *e-mail attachment*, ke alamat e-mail redaksi. Penyunting berhak melakukan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi tulisan.

*Pelindung :*  
A. Luthfi Hamidi  
*Penanggung Jawab :*  
Rohmad  
*Konsultan :*  
Muhammad Irsyad  
*Ketua Editor :*  
Muskinul Fuad  
*Editor Pelaksana :*  
Heru Kurniawan  
*Dewan Redaksi :*  
Ridwan  
Mufliah  
Hariyanto  
Muh. Hanif  
M. Shofwan Mabrur  
*Tata Usaha :*  
Lukman Aminudin  
Turyatin



Alamat Redaksi:  
Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M)  
STAIN Purwokerto  
Lt. III Gedung Pusat, Jl. A. Yani 40 A, Purwokerto (53126)  
Email : [jpapwt@yahoo.com](mailto:jpapwt@yahoo.com)

## DAFTAR ISI

- Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Banyumas (Studi Tentang Eksistensi dan Akulturasi Budaya) ♦ 1  
*Agus Sriyanto*
- حكم الزواج بين رضعاء ألبان بنوك اللبن عند علماء الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة 20 ♦  
خبير الأمر هاراهاف
- Qawa'id Fiqhiyyah* dan Tantangan Zaman: Analisis Kontekstualitas dan Peran *Qawa'id Fiqhiyyah* dalam Solusi Problematika Hukum Islam ♦ 41  
*Ansori*
- Model Penyelesaian Konflik Keagamaan: Studi Penyelesaian Konflik Keagamaan oleh FKUB Kabupaten Banyumas ♦ 67  
*Asyhabuddin*
- Ideologi Jilbab (Pergeseran Makna dan Religiusitas Pemakaian Jilbab di Indonesia) ♦ 85  
*Ida Novianti*
- Membangun Partisipasi Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Studi Kritis Partisipasi Ulama dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas) ♦ 101  
*Nita Triana*
- Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Berperspektif Gender di Kabupaten Banyumas ♦ 129  
*Luthfi Hamidi, Durrotun Nafisah, & Aris Nurohman*
- Pembentukan Habitus Budaya Agama di SMA Islam Swasta Kabupaten Banyumas ♦ 153  
*Muh. Hanif*
- Turâts* dalam Pandangan Zaki Naguib Mahmud (1905 – 1993) (Implikasinya pada Pemikiran Keislaman di Pesantren Salaf Indonesia) ♦ 177  
*Supriyanto*
- Membangun “Pengantin” al-Qur'an dalam Pandangan Quraish Shihab ♦ 203  
*Naqiyah*
- Ucapan Terimakasih 217

# MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KRITIS PARTISIPASI ULAMA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS)

Nita Triana \*)

**Abstract:** This study was aimed at explaining comprehensively the social participation, especially from religious leader or Ulama in composing District Rules (Perda) on Traditions. This is a nondoctrinal study with a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and document studies with socio-legal approach. Data were analyzed using interactive cycles of Strauss and J Corbin. The result showed that: the participation of religious leaders (Ulama) in composing Perda was at the level of tokenism, meaning that it seemed they had a participation in the activity, but it was not a real participation. They were invited to at the dicussion on development planning and socialization of the Perda. The problem related to the application of this system of participation was that the government bureaucracy was still not transparent and participative. Culturally, there was a patron-klin tradition, i.e. the government was the patron or designer that determined the pattern, while the society realized what had been patronized by the government. It is necessary to build a responsive and participative law of bureaucracy both from the government and ulama. It can be realized if there is a continuous communication between the government and ulama.

**Keywords:** Partisipasi, Ulama, Peraturan Daerah, Komunikasi

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* atau *kratos* yang berarti pemerintahan. Pada perkembangannya Abraham Lincoln, mengartikannya sebagai *government of the people, by the people, for the people*, yaitu sistem pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, baik yang

---

\*) Penulis adalah dosen STAIN Purwokerto.